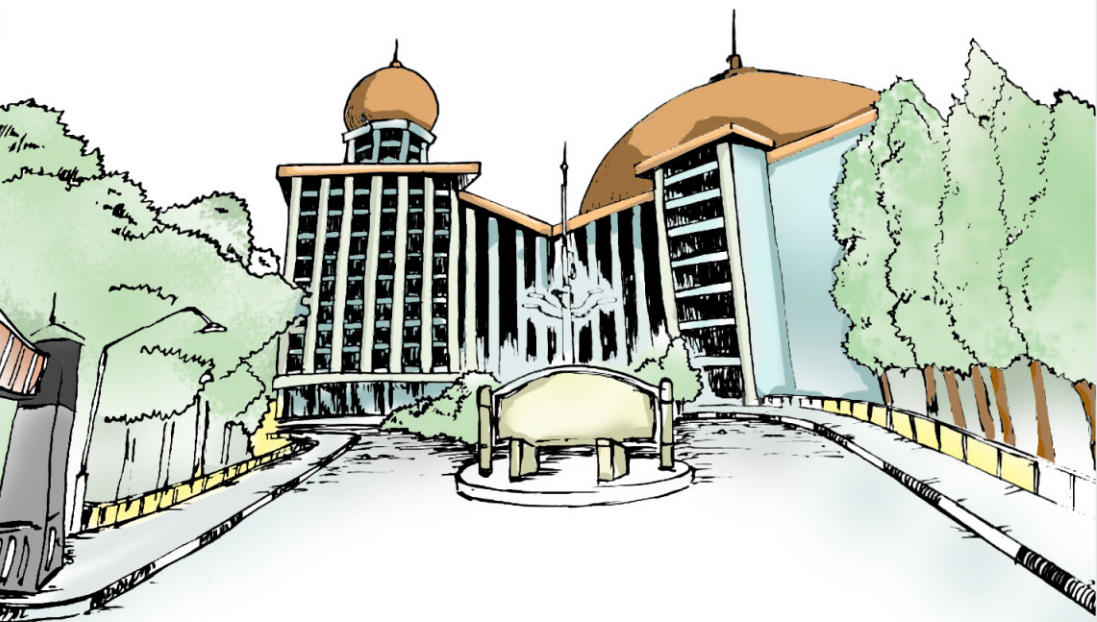


ULAMA DAN NEGARA-BANGSA

Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia

Disunting oleh:
Noorhaidi Hasan



ULAMA
DAN
NEGARA-BANGSA

Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia

Disunting oleh: Noorhaidi Hasan

ULAMA DAN NEGARA-BANGSA

Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia



Noorhaidi Hasan | Suhadi | Miftahun Ni'mah Suseno
Moch Nur Ichwan | Nina Mariani Noor
Euis Nurlaelawati | Muhrisun | Munirul Ikhwan
Mohammad Yunus | Najib Kailani | Sunarwoto
Ro'fah | Eva Latipah | Ahmad Rafiq
Roma Ulinnuha | Ibnu Burdah

**ULAMA DAN NEGARA-BANGSA:
Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia**

Penulis

Noorhaidi Hasan, Suhadi, Najib Kailani, Munirul Ikhwan, Ahmad Rafiq, Euis Nurlaelawati, Eva Latipah, Ibnu Burdah, Moch Nur Ichwan, Mohammad Yunus, Muhrisun, Nina Mariani Noor, Ro'fah, Roma Ulinuha, Sunarwoto, dan Miftahun Ni'mah Suseno

Penyunting: Noorhaidi Hasan

Pemeriksa Aksara: Najib Kailani & Munirul Ikhwan

ISBN: 978-623-90252-05

Cetakan I, Juni 2019

xxxiv, + 272 hlm; 14.5 x 21 cm

Desain Layout: Tim Stelkendo

Desain Sampul: Imam Syahirul Alim

Ilustrasi Sampul: Thoriq Kamil

Penerbit:

Pusat Pengkajian Islam, Demokrasi, dan Perdamaian (PusPIDeP)

Jl. Gurami No. 51 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo,

Kota Yogyakarta, DIY 55164

Tlp: 0274 6657257

puspideppress@gmail.com

<http://www.puspidep.org>

Bekerja sama dengan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. **Suhadi Cholil** adalah dosen tetap Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Minat penelitiannya adalah di bidang studi antariman. Dia menyelesaikan program doktoralnya di Radboud University Nijmegen Belanda dalam bidang *Inter-Religious Studies* (2014). Di antara publikasinya adalah *I Come from a Pancasila Family: A Discursive Study on Muslim-Christian Identity Transformation in Indonesian Post-Reformasi Era*, Berlin: LIT, 2014, *Protecting the Sacred: An Analysis of Local Perspectives on Holy Site Protection in Four Areas in Indonesia*, Yogyakarta: CRCS UGM-SfCG-Norwegian Embassy, 2016, dan *Pendidikan Interreligius, Buku Suplemen Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi*, Jakarta: CDCC, 2017.
4. **Munirul Ikhwan** adalah dosen tetap Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Minat penelitiannya mencakup studi Alquran dan tafsirnya, studi Islam dan masyarakat Muslim, dan sejarah intelektual Islam. Ia meraih gelar Ph.D di bidang Studi Islam dari Freie Universität Berlin (2015). Di antara publikasinya adalah “Western Studies of Qur’anic Narratives: from the Historical Orientation into the Literary Analysis”, *Al-Jamiah*, 48/2, 2010, “FITaḥaddī al-Daula: “al-Tarjama al-Tafsīriyya“ fi Muwājahat al-Khiṭāb al-Dīnī al-Rasmī li al-Daula al-Indūnīsiyya”, *Journal of Qur’anic Studies*, 17/3, 2015, dan “Tafsir Alquran dan Perkembangan Zaman: Merekonstruksi Konteks dan Menemukan Makna”, *Jurnal NUN*, 2/1, 2016.
5. **Najib Kailani** adalah dosen tetap Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Minat penelitiannya mencakup antropologi Muslim urban, anak muda dan ekonomi karitas. Dia memperoleh gelar Ph.D dari University of New South Wales (UNSW) Australia (2015). Di antara publikasinya adalah “Forum Lingkar Pena and Muslim Youth in Contemporary Indonesia”, *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 46/1, 2012, dan “Preachers-cum-Trainers: The Promoters of Market Islam in Urban Indonesia,” dalam

DAFTAR ISI

Tentang Kontributor ~ iii

Pengantar ~ xv

1. Pendahuluan

Noorbaidi Hasan ~ 1

2. Ulama dan Negara-Bangsa dalam Survei

Subadi & Miftabun Ni'mah Suseno ~ 17

3. Tantangan Islam Politik dan Krisis Legitimasi Ulama

Noorbaidi Hasan ~ 47

4. Arah Baru Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Moch Nur Ichwan & Nina Mariani Noor ~ 67

5. Ulama, Negara, dan Wajah Hukum Islam

Euis Nurlaelawati & Mubrisun ~ 97

**6. Amar Makruf Nahi Munkar dan Politik
Ortodoksi Ulama**

Munirul Ikbwan & Mobammad Yunus ~ 135

**7. Televangelisme Islam dalam Lanskap Otoritas
Keagamaan Baru**

Najib Kailani & Sunarwoto ~ 179

**8. Strategi Bertahan dan Aktivitas Pendidikan Islam di
Kawasan Minoritas**

Ro'fah & Eva Latipah ~ 207

9. Memandang Negara-Bangsa dari Pinggir

Abmad Rafiq & Roma Ulinnuba ~ 237

10. Epilog

Ibnu Burdah ~ 259

ULAMA DAN NEGARA-BANGSA DALAM SURVEI



Suhadi & Miftahun Ni'mah Suseno

Polemik tentang hubungan agama dan negara bersifat *recurrent* dan biasanya menguat saat terjadi perubahan-perubahan penting dalam lanskap politik. Dalam konteks ini menjadi penting untuk memeriksa ulang sejauh mana pro-kontra di kalangan ulama masih berlangsung terkait dengan dasar dan format negara, dengan menggali persepsi dan sikap mereka tentang negara-bangsa, berkait bukan saja dengan sistem dan formatnya, tetapi juga prinsip-prinsip dasar yang menopangnya, termasuk kewargaan, toleransi, demokrasi, Hak-hak Asasi Manusia, kesetaraan gender, dan seterusnya. Usaha ini dilakukan pertama-tama melalui survei di lima belas kota Indonesia, yang bertujuan memetakan sikap serta pandangan ulama dari berbagai latar belakang afiliasi sosial, politik, dan keagamaan tentang format negara-bangsa, bersama konsep-konsep dasar yang menopangnya.

Penelitian sebelumnya tentang ulama hampir semua menekankan pendekatan kualitatif yang fokusnya dapat dipilah menjadi empat bagian. *Pertama*, penelitian tentang MUI, baik fatwa-fatwanya seperti Mudzhar (1990, 2001), Hosen (2003, 2004), Adams (2012), Sholeh (2016), Sirry (2013), maupun perilaku politiknya, seperti Ichwan (2005, 2012, 2013, 2016), Menchik (2007), Hasyim (2014, 2015), dan Saat (2016). *Kedua*, penelitian ulama dalam konteks budaya, seperti

Hirokoshi (1987), Dhofier (1999), Mansurnoor (1990), Pribadi (2013), Hoesterey (2015). *Ketiga*, penelitian tentang ulama dalam konteks sejarah, seperti Azra (2004) dan Hisyam (2001). *Keempat*, penelitian tentang ulama dalam konteks politik secara umum, seperti Van Dijk (1996), Bruinessen (1990), Berhend (2003) dan Kersten (2015). Di luar kajian tentang MUI pasca-Orde Baru, yang menyinggung soal pandangan dan perilaku politik mereka, masih belum banyak yang secara spesifik melihat persepsi dan pandangan ulama Indonesia mengenai negara-bangsa, terutama kajian kuantitatif. Tulisan ini berusaha mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian yang menggunakan metode survei ini dilaksanakan di kota-kota yang dipilih berdasarkan tiga kategori: Kategori kota metropolitan di mana kultur urban Muslim sangat kuat (Jakarta, Medan, Bandung, Makassar dan Surakarta); Kota dengan dominasi populasi ulama (dan tradisi Islam) arus utama yang cukup besar (NU dan Muhammadiyah), yaitu Banda Aceh, Padang, Palangka Raya, Surabaya dan Banjarmasin); Terakhir, kota dengan isu minoritas yang khas (Pontianak, Denpasar, Manado, Kupang dan Ambon). Dengan keragaman lokasi yang dipilih, survei diharapkan memberi gambaran tentang peta persepsi dan pandangan ulama mengenai negara-bangsa dalam skala nasional, maupun dinamika dan nuansa lokal.

Dalam penelitian ini definisi ulama merujuk pada *religious scholar* dan *religious entrepreneur*. *Religious scholar* adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan agama secara formal dalam arti mengkaji dan mendalami teks-teks keislaman secara khusus, baik melalui institusi pendidikan seperti pesantren, universitas Islam terkemuka dunia, seperti Al-Azhar, Ibnu Saud, Tarim Hadramaut dan UIN/IAIN maupun yang mempelajari secara khusus melalui tradisi majelis taklim yang ketat. Mereka mempunyai pengetahuan yang mendalam di bidang fikih, tauhid, tasawuf atau pendidikan Islam dan bidang keislaman lainnya. Dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan tersebut, mereka memperoleh otoritas dalam

menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan diakui oleh para jamaahnya. Seringkali *religious scholar* juga merupakan pemimpin (organisasi) keagamaan atau *religious leader* yang aktif dalam menjalankan roda organisasi keagamaan dan mempunyai visi keumatan, termasuk guru di sekolah keagamaan. Dalam kajian keserjanaan ulama, *religious scholar* umumnya diasosiasikan dengan otoritas keagamaan tradisional (*traditional religious authority*).

Pesatnya perkembangan lembaga pendidikan dan lahirnya media baru di negara-negara Muslim pada gilirannya berkontribusi pada munculnya otoritas-otoritas keagamaan baru. Berbeda dengan otoritas keagamaan tradisional, otoritas keagamaan baru umumnya tidak mempunyai latar belakang pendidikan keagamaan yang ketat. Mereka memperoleh pengetahuan agama melalui sumber-sumber yang tersedia dan mudah diakses seperti buku-buku terjemahan, pengajian, dan mendengarkan serta mengikuti pengajian di media baru seperti televisi dan internet. Dalam kajian akademik, otoritas keagamaan baru ini juga disebut sebagai *religious entrepreneur* karena kemampuan mereka dalam mengemas pesan-pesan keagamaan melalui berbagai medium seperti tulisan, pelatihan, dan video pendek dan disampaikan melalui media baru sehingga menjangkau pemirsa yang lebih luas. Ulama yang menjadi responden survei ini mencakup ulama dalam dua definisi tersebut sekaligus.

METODE

Survei dilakukan berbasis kelompok (*group-based survei*) dengan responden dari kelompok ulama atau tokoh agama Islam. Survei ini melibatkan 450 responden yang tersebar di lima belas kota (masing-masing kota 30 responden). Karena tidak ditemukan data populasi ulama Indonesia —baik oleh negara maupun lembaga swasta— pendataan populasi ulama di masing-masing kota menjadi langkah pertama yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan teknik *proportionate stratified random sampling* dengan mempertimbangkan persebaran

sampling responden secara memadai dari setiap kelompok ulama dan karakter kota.

Pengelompokan strata berdasarkan pada latar belakang organisasi/gerakan keagamaan di mana persebaran dan variasi responden masing-masing kota ditentukan dengan melihat empat kategori berikut: *Pertama*, ulama arus utama yang tergabung/memiliki kedekatan dengan MUI, NU/ Muhammadiyah/ Persis (menyesuaikan dengan konteks lokal), dengan prioritas ulama yang memiliki basis pesantren dan/atau menjadi tokoh/pemikir dari lingkungan kampus. *Kedua*, ulama dari gerakan Islam “baru” (salafi, tarbawi, atau tahriri, dll.) yang berpotensi menjadikan negara-bangsa masih sebagai polemik dalam diskursus maupun gerakannya. *Ketiga*, ulama/tokoh dari kelompok minoritas di dalam Islam, seperti Syiah, Ahmadiyah, dll. *Keempat*, ulama baru yang memiliki kecenderungan sebagai *religious entrepreneur*, biasanya ulama dalam kategori ini berusia relatif muda (kurang dari 40 tahun) dengan sebagian besar audiennya merupakan generasi milenial.

Selain itu, pemilihan juga didasarkan pada faktor usia, gender, dan tingkat pendidikan. Proporsi yang digunakan adalah 50 persen dari data populasi ulama di masing-masing daerah yang didapatkan dari *mapping* awal yang dilakukan oleh peneliti bersama asisten peneliti di tiap daerah, dan selanjutnya dilakukan proses random dengan mempertimbangkan keterwakilan di masing-masing strata tersebut, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 30 ulama di setiap kota/ lokasi penelitian. Survei ini menggunakan batas tingkat kepercayaan 95 persen, dan diketahui simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 33,69, kesalahan baku (*standard error*) sebesar 1,59 dengan *margin of error* sebesar 3,11. Pengukuran karakteristik ulama menggunakan skala sikap yang terdiri dari 70 aitem (pernyataan) dengan tingkat reliabilitas *cronbach alpha* sebesar 0,98.

Hasilnya, responden survei terdiri dari 76,22 persen laki-laki dan 23,78 persen perempuan. Total responden yang mengaku berafiliasi ke NU (termasuk Fatayat, Muslimat, Ansor, dst.)

berjumlah 22,22 persen, Muhammadiyah (terhitung Aisyiah, Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, dst.) sebesar 15,78 persen, Ahmadiyah dan Syiah terbilang 5,33 persen dan sisanya 35,56 persen berasal dari beragama ulama yang berafiliasi dengan ragam organisasi atau gerakan baik di tingkat nasional maupun lokal yang berjumlah tidak kurang dari 60 organisasi atau kelompok. Sebagai konsekuensi dari lokasi penelitian di daerah urban (kota), latar pendidikan ulama yang menjadi responden penelitian ini terbilang berpendidikan tinggi. Persentase terbesar responden penelitian ini berpendidikan akhir S-3 (31,31 persen), kemudian sedikit lebih kecil disusul mereka yang berpendidikan akhir S-2 (30,63 persen) dan S-1 (29,28 persen). Sementara itu yang berpendidikan SLTA hanya berjumlah 6,08 persen.

DEFINISI DAN PENGUKURAN

Dalam survei ini pengukuran merupakan proses kuantifikasi suatu atribut yang bertujuan untuk memperoleh gambaran kuantitatif berupa skor yang diperoleh dengan menggunakan alat ukur yang mempunyai karakteristik tujuan ukur. Pengembangan alat ukur merujuk pada rekomendasi Komite Bersama yaitu *American Educational Research Association (AERA)*, *American Psychological Association (APA)* & *National Council on Measurement in Education (NCME)* (1999), Marnat (2003), Kline (2005), Urbina (2004), Azwar (2012) dan Netemeyer, *et.al.* (2003), yaitu:

a. Penetapan Pengertian dan Batasan Pengukuran

Dalam penelitian ini pengukuran sikap ulama terhadap negara-bangsa menggunakan skala sikap yang dikembangkan dari konsep empat *dimensi* yang disusun oleh tim peneliti yaitu pro-sistem, anti-kekerasan, toleransi dan pro-kewargaan yang merujuk pada para ahli dalam bidang ini. *Pertama*, dimensi *pro-sistem* didefinisikan sebagai sikap dan pemahaman yang menghormati serta menerima sistem negara-bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di

dalam dimensi ini juga terdapat aspek pro-pemerintahan yang merupakan sikap dan pemahaman yang menghormati dan menerima format pemerintahan, keabsahan pemerintahan yang berkuasa yaitu pemerintahan yang dipilih melalui demokrasi elektoral dan terbuka bagi aspek partisipasi masyarakat dari beragam latar belakang politik dan sosial. Lebih lanjut pro-sistem juga berarti sikap menerima produk-produk hukum yang dihasilkan dengan mengacu pada konstitusi negara dengan melibatkan pemerintah dan parlemen, serta menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi dalam memutus *review* atas ketidakselarasan undang-undang dengan konstitusi.

Kedua, dimensi *anti-kekerasan* didefinisikan sebagai sikap yang memberi perhatian pada *promotion of life* dan hak untuk hidup (Anand 2016) serta menggali sikap anti-kekerasan pada level personal baik yang bersifat nyata maupun yang laten (Galtung 1996). Sedangkan dimensi *toleransi* dimaknai terbatas dalam konteks toleransi beragama, yang didefinisikan sebagai sikap seseorang dalam menerima perbedaan agama dan keyakinan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Sikap toleran sendiri lebih menekankan pada bentuk penerimaan pada keyakinan agama lain (toleransi eksternal) maupun perbedaan paham dalam satu rumpun agama (toleransi internal; Woolf & Hulsizer 2003).

Ketiga, dimensi *pro-kewargaan* adalah sikap penerimaan terhadap prinsip kewargaan yang meliputi beberapa prinsip dasar seperti prinsip keadilan (*justice*) yang merujuk pada bentuk keadilan dan kesetaraan bagi semua warga di muka hukum, prinsip pengakuan (*recognition*) yang merujuk pada pengakuan negara atas keragaman individu, dan prinsip *self-determination* yang menekankan pada hak individu untuk mengambil keputusan atas nama dirinya sendiri sebagai warga negara tanpa ada intervensi dan kontrol dari pihak lain, termasuk negara. Selain itu, juga terdapat prinsip *solidarity* yang merujuk pada kapasitas individu untuk bersatu dengan yang lain dalam upaya untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya sebagai warga negara (Lister & Pia 2008).

Karakteristik	Sub Karakteristik	Level Progresif	Sub Karakteristik	DIMENSI			
				Anti-Kekerasan	Pro-Sistem	Toleransi	Pro-Kewargaan
Acceptance	Progresif	Progresif Tinggi	Progresif	√	√	√	√
		Progresif Sedang	Inklusif	√	√	√	√
		Progresif Rendah	Moderat	√	√	√	√
	Moderat		Konservatif	√	√	√	-
Rejection	Konservatif		Eksklusif	√	√	-	-
	Radikal		Radikal	√	-	-	-
	Ekstrim		Ekstrim	-	-	-	-
Tidak Teridentifikasi	Tidak Teridentifikasi		Tidak Teridentifikasi				

Dalam dimensi *pro-kewargaan* tersebut terdapat dua unsur penting: (a) *pro-demokrasi* yang merupakan sikap atau pandangan yang menghargai dan secara aktif mendorong demokrasi berjalan sebagai sistem pemerintahan di mana kedaulatan politik dikuasai oleh rakyat dan dikontrol secara langsung oleh rakyat (Campbell 2008). Dan (b), *pro-HAM* (hak asasi manusia) yaitu sikap dan pandangan yang mengakui HAM yang merujuk pada hak asasi manusia yang tertera di dalam Konstitusi Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen). Lebih spesifik lagi, hak asasi manusia yang dimasukkan di sini direservasi sesuai dengan konteks penelitian tentang ulama yaitu tingkat penerimaan terhadap konsep dasar HAM, hak beragama, hak bersyarikat, dan perlakuan non-diskriminatif. Secara lebih eksplisit batasan pengukuran yang digunakan dalam survei ini sebagaimana tergambar dalam matriks di bawah ini.

b. Penyusunan Blue Print Pengukuran, Penulisan Aitem dan Validitas Isi

Pengukuran karakteristik ulama dikembangkan dengan menyusun indikator perilaku berdasarkan 4 dimensi negara-bangsa sehingga dihasilkan *blueprint* skala karakteristik ulama sebagai acuan dalam penyusunan aitem-aitem yang detilnya dapat di lampiran 1 bab ini. Setelah aitem-aitem dalam skala sikap karakteristik ulama sudah tersusun maka dilanjutkan dengan proses *review* yang dilakukan oleh penulis aitem

sendiri yaitu dengan memeriksa ulang setiap aitem yang baru ditulis apakah sesuai dengan indikator perilaku yang akan diungkap dan juga melakukan *review* terhadap tata bahasa aitem. Proses *review* dilakukan oleh orang yang berkompeten (*expert/proffesional judgement*) baik dari ahli bahasa maupun orang yang memahami konstruksi alat ukur karakteristik ulama yang hasil *review*-nya disampaikan dalam beberapa kali workshop *research design*. Proses *review* ini sebagai langkah untuk melakukan pengujian validitas isi yang menunjukkan sejauh mana aitem-aitem dalam alat ukur karakteristik ulama mencakup isi yang hendak diukur dan tidak keluar dari batasan tujuan pengukuran.

Pengujian validitas isi secara statistik dilakukan dengan menggunakan formula yang diusulkan oleh Aiken (1985) untuk menghitung koefisien validitas isi yang didasarkan pada hasil penilaian dari panel ahli terhadap suatu aitem dari segi sejauh mana aitem tersebut mewakili konstruk yang diukur. Skor *V* memiliki kemungkinan nilai 0 s.d. 1 yang menunjukkan derajat validitas aitem. Sebuah aitem dianggap valid manakala memiliki *V* sebesar 0.5 atau lebih. Hasil pengujian validitas isi melibatkan 20 ahli di bidang kajian ulama dan hasil analisis menunjukkan rentang nilai *V* sebesar 0,61 sd 0,92 sehingga dapat disimpulkan bahwa 80 aitem-aitem yang terdapat pada skala sikap karakteristik ulama termasuk valid.

c. Pemilihan Aitem dan Pengambilan Data Uji Coba Skala

Kumpulan aitem dari skala sikap kerarakteristik ulama yang telah melalui proses analisis validitas isi kemudian dilakukan *review* ahli melalui diskusi kelompok terarah dengan teknik *cognitive debriefing* yang bertujuan untuk mengetahui apakah kalimat dalam aitem mudah dipahami dari sisi tata bahasa oleh responden sebagaimana diinginkan oleh penulis aitem. *Cognitive debriefing* pada dasarnya merupakan sebuah metode yang dikembangkan untuk validasi linguistik bagi alat ukur yang digunakan dalam skala internasional. Tujuan utama dari *cognitive debriefing* adalah memastikan apakah pertanyaan atau

aitem-aitem dalam skala sikap dapat dipahami sebagaimana dimaksudkan oleh penyusun alat atau pertanyaan itu sendiri (Hoben dkk. 2014).

Langkah selanjutnya adalah pengambilan data *try out* untuk tujuan penskalaan dan mengevaluasi kualitas aitem dalam alat ukur skala sikap kerarakteristik ulama secara statistik dengan melibatkan 30 responden sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan representasi dari populasi yaitu ulama atau *religious leader* yang tinggal di daerah Yogyakarta.

d. Analisis Data dan Penyusunan Format Final Alat Ukur

Data yang sudah terkumpul dari 30 responden digunakan untuk analisis pengujian parameter-parameter guna mengetahui apakah aitem memenuhi persyaratan psikometris untuk disertakan sebagai bagian dalam skala. Parameter pertama adalah diskriminasi aitem dengan menghitung koefisien korelasi antara aitem dengan total skor skala (r_{ix}) sebagai indikator keselarasan atau konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara keseluruhan, yang disebut konsistensi aitem total (Azwar, 2012). Aitem yang memuaskan adalah yang mempunyai nilai koefisien korelasi aitem-toal (r_{ix}) sama dengan atau lebih dari 0,30 (Azwar 2012). Hasil analisis aitem ini menjadi dasar seleksi aitem. Aitem yang tidak memenuhi syarat psikometris akan dibuang atau direvisi lebih dahulu sebelum dapat menjadi bagian dari skala.

Berdasarkan hasil analisis diskriminasi aitem diketahui bahwa terdapat 10 aitem dinyatakan tidak lolos seleksi, sehingga skala sikap kerarakteristik ulama terdiri dari 70 aitem yang lolos seleksi dengan nilai koefisien korelasi aitem-total (r_{ix}) bergerak antara 0,301-0,903. Dapat disimpulkan bahwa dari sisi kualitas daya diskriminasi aitem dalam skala sikap kerarakteristik ulama memenuhi standar kualitas indeks daya beda.

Parameter kedua adalah estimasi reliabilitas alat ukur. Reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode konsistensi internal, salah satunya adalah formula koefisien Alpha. Skala sikap kerarakteristik ulama diketahui mempunyai

nilai reliabilitas 0,98 dan hal ini menunjukkan tingkat reliabilitas baik atau *excellent* sebagai alat ukur. Hal ini sesuai dengan pendapat Azwar (2012) yang menyatakan skala yang dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik adalah yang mempunyai koefisien reliabilitas di atas 0,9. Begitu juga menurut Kline (2005) mengelompokkan batasan koefisien reliabilitas *excellent* dengan skor sekitar 0,90. Sedangkan Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham (2006) menyebutkan bahwa untuk penelitian dengan pendekatan eksplorasi dengan koefisien reliabilitas 0,70 sudah dianggap layak atau memenuhi.

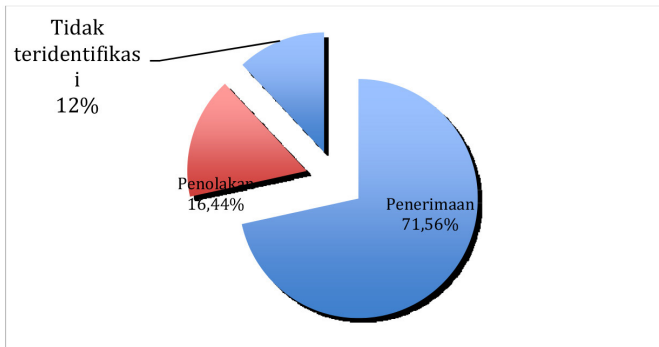
Pengujian diskriminasi aitem dan estimasi reliabilitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi *software Statistical Package for Social Science* (SPSS) for Windows versi 20 sesuai langkah-langkah analisis dalam petunjuk yang ada pada manual buku yang ditulis oleh Landau & Everitt (2004). Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun format final skala sikap kerarakteristik ulama yang merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari penelitian ini. *Blue print* Skala sikap kerarakteristik ulama format final dapat dibaca di lampiran 2 bab ini.

HASIL SURVEI

Setelah konsep dan metode penelitian dijelaskan panjang lebar di atas, di bawah ini dipaparkan hasil surveinya. Sebagaimana pada umumnya penelitian kuantitatif, kami meminimalisir tafsir tentang hasil survei. Narasi hasil temuan survei dipaparkan secara deskriptif. Penjelasan panjang tentang dinamika sikap ulama terhadap negara-bangsa di lapangan akan dibahas oleh bab-bab lain dalam buku ini. Di akhir kami menulis kesimpulan dan diskusi singkat.

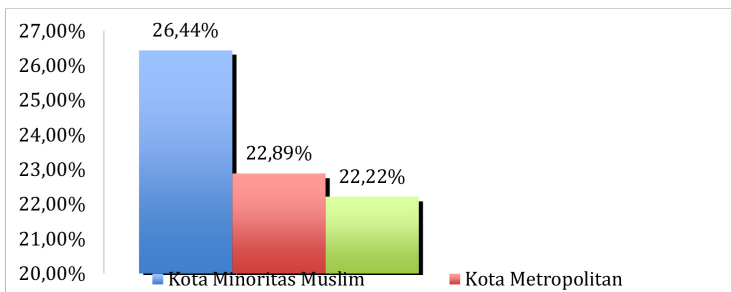
a. Penerimaan dan Penolakan

Gambaran umum penelitian ini menunjukkan persentase ualama yang menerima konsep negara-bangsa tergolong tinggi, yaitu 71,56 persen. Sementara itu, mereka yang menolak berjumlah 16,44 persen. Sisanya tidak teridentifikasi.



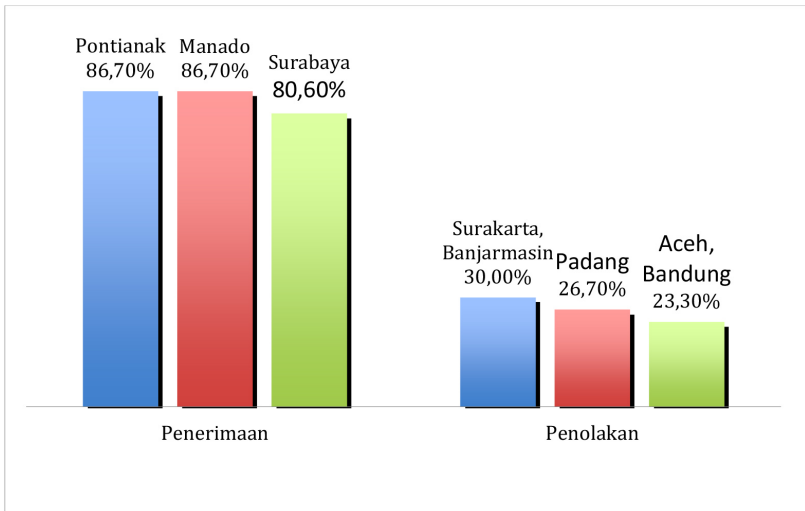
Grafik 1: Penerimaan dan Penolakan Ulama terhadap konsep negara-bangsa

Survei ini juga menemukan perbedaan tingkat penolakan dan penerimaan dilihat dari aspek kluster kota yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu kota metropolitan, kota arus utama Islam, dan kota dengan minoritas Muslim. Meskipun selisih angka persentasenya tidak terlalu besar, tingkat penerimaan terhadap konsep negara-bangsa dan turunannya di kota dengan minoritas Muslim memiliki kecenderungan lebih tinggi (26,44 persen) dibanding dengan kota metropolitan (22,89 persen) dan kota arus utama Muslim (22,22 persen). Dari aspek karakteristik juga menunjukkan pola serupa. Sampai di sini dapat kita tarik ikhtisar bahwa ulama di kota yang berpenduduk semakin plural maka mereka semakin memiliki penerimaan yang lebih tinggi terhadap negara-bangsa.



Grafik 3: Penerimaan dan penolakan negara-bangsa berdasarkan kluster kota

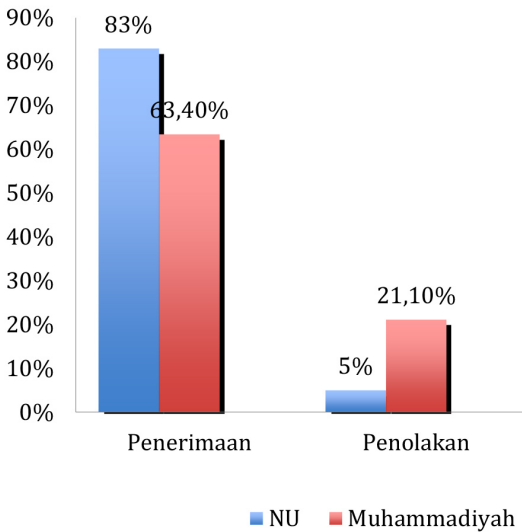
Jika kita lihat perbandingan kota juga tampak perbedaan angka penolakan dan penerimaan terhadap konsep negara-bangsa. Dari hasil survei tampak bahwa ulama di Pontianak (86,70 persen) dan Manado (86,70 persen) merupakan kota dengan ulama yang paling banyak menunjukkan sikap menerima konsep negara-bangsa, disusul dengan ulama di Surabaya sebanyak 80,60 persen dan ulama di Ambon sebanyak 80 persen. Sedangkan ulama yang memiliki kecenderungan paling tinggi menolak konsep negara-bangsa adalah ulama di kota Surakarta (30 persen) dan Banjarmasin (30 persen), disusul Padang (26,70 persen) dan terakhir Aceh (23,30 persen) dan Bandung (23,30 persen).



Grafik 4: Penerimaan dan penolakan tertinggi berdasarkan kota

Temuan penerimaan dan penolakan berdasarkan kota menjelaskan dinamika sikap yang berbeda-beda terhadap konsep negara-bangsa di berbagai lokasi penelitian. Banyak faktor yang menyebabkan perbedaan sikap tersebut, baik dari sisi sikap pribadi ulama secara subjektif maupun faktor sejarah dan kebudayaan di masing-masing kota yang belum bisa dijelaskan oleh studi kuantitatif ini.

Survei ini juga menemukan fakta menarik sikap ulama berdasarkan afiliasi organisasi keagamaan. Penerimaan ulama NU terhadap konsep negara-bangsa sebesar 83 persen, yaitu lebih tinggi dibandingkan dengan ulama Muhammadiyah di mana mereka yang menerima konsep negara-bangsa berjumlah 63,4 persen. Hal ini juga terkonfirmasi dalam hal penolakan, tercatat ulama Muhammadiyah yang menolak konsep negara-bangsa sebanyak 21,1 persen dan ulama NU hanya 5 persen. Hal ini menjadi temuan menarik, meskipun karena keterbatasannya survei ini tidak dapat bercerita lebih mendalam lagi.

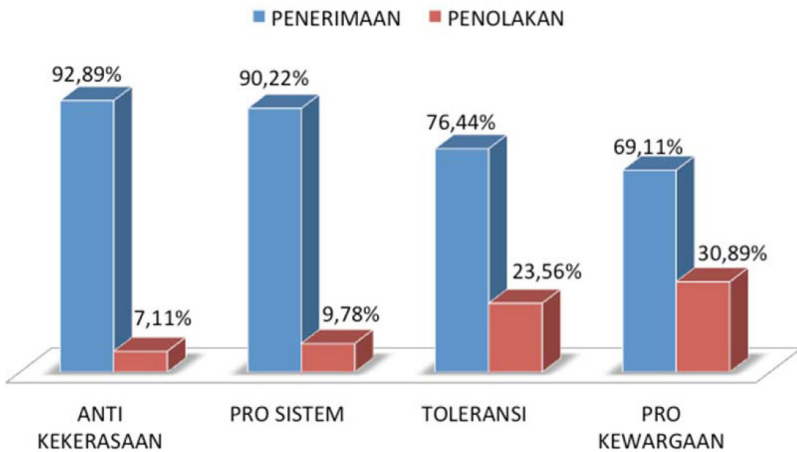


Gambar 6: Penerimaan dan penolakan berdasarkan organisasi keagamaan

b. Dimensi Sikap

Kecenderungan penerimaan maupun penolakan menarik bila dipotret dari aspek empat dimensi yang dipakai dalam penelitian ini. Secara berurutan penerimaan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah adalah anti-kekerasan, pro-sistem,

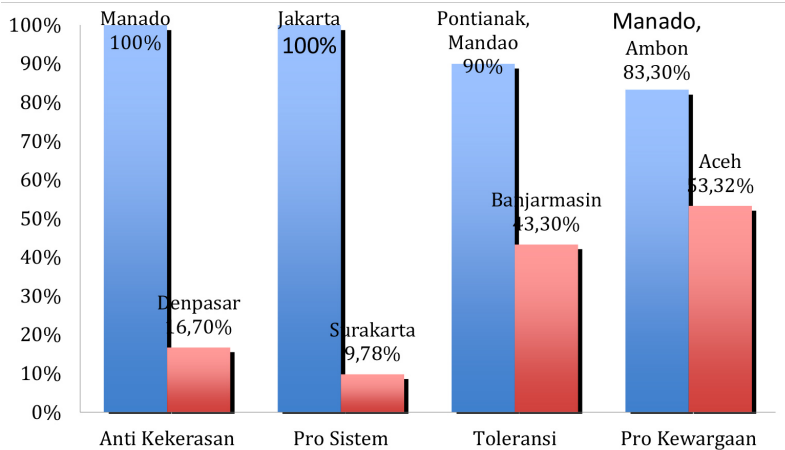
toleransi, dan kemudian pro-kewargaan. Penerimaan yang sangat tinggi ada pada dimensi anti-kekerasan (penerimaan 92,89 persen; penolakan 7,11 persen) dan pro-sistem (penerimaan 90,22 persen; penolakan 9,78 persen). Sedangkan penerimaan dalam dua dimensi yang lain terbilang lebih rendah, yaitu dimensi toleransi (penerimaan 76,44 persen; penolakan 23,56 persen) dan dimensi pro-kewargaan (penerimaan 69,11 persen; penolakan 30,89 persen).



Grafik 7: Dimensi penerimaan dan penolakan

Analisis antardaerah tentang aspek dimensi tersebut menunjukkan bahwa ulama di kota Manado tergolong paling tinggi sikap anti-kekerasannya, yaitu sebanyak 100 persen, sebaliknya ulama di Denpasar menunjukkan dukungan anti-kekerasan yang terendah 16,70 persen. Ulama di Jakarta tercatat 100 persen mendukung pro-sistem, sedangkan yang paling rendah ada di Surakarta, yaitu 9,78 persen. Sementara pada dimensi toleransi, yang tertinggi ada di kota Pontianak dan Manado yang sama-sama berjumlah 90 persen, sedangkan yang menempati posisi terendah ada di Banjarmasin yaitu 43,30 persen. Terakhir adalah dimensi pro-kewargaan di mana yang paling tinggi terdapat di Manado dan Ambon dengan

masing-masing persentasenya 83,30 persen. Sedangkan ulama yang tidak mendukung prinsip kewargaan terbesar ditemukan di Aceh sejumlah 53,32 persen. Di bawah ini grafik persentase tertinggi dan terendah untuk tiap dimensi berdasarkan kota.



Grafik 8: Dimensi karakteristik ulama antar daerah

Hasil uji statistika inferensial menemukan beberapa hal yang menarik, antara lain berdasarkan hasil analisis *independent sample test* ditemukan bahwa tidak ada perbedaan penerimaan dan penolakan konsep negara-bangsa baik pada ulama laki-laki maupun ulama perempuan. Dari sisi dimensi konsep negara-bangsa juga tidak ada perbedaan penilaian antara ulama laki-laki dan perempuan dalam menilai konsep dimensi anti-kekerasan, pro-sistem, toleransi maupun pro-kewargaan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor perbedaan gender pada ulama tidak menjadi penyebab munculnya perbedaan penilaian ulama terhadap konsep negara-bangsa.

Sedangkan dari sisi usia, dalam hal ini usia dibagi dalam dua kelompok yaitu usia di atas 45 tahun dan di bawah 45 tahun. Berdasarkan analisis *independent sample test* ditemukan bahwa ada perbedaan sikap ulama dalam tiap dimensi konsep negara-bangsa yang hasilnya menunjukkan bahwa kecenderungan ulama dengan usia dibawah 45 tahun

mempunyai nilai (penerimaan) yang lebih tinggi dalam setiap dimensi karakteristik ulama. Penilaian terhadap dimensi anti-kekerasan menunjukkan nilai $t=3,080$ ($p<0,05$) dengan nilai rerata ulama usia kurang dari 45 tahun sebesar 34,36 sedangkan ulama usia di atas 45 tahun mempunyai rerata sebesar 33,17. Penilaian terhadap dimensi pro-sistem menunjukkan nilai $t=2,711$ ($p<0,05$) dengan nilai rerata ulama usia kurang dari 45 tahun sebesar 68,02 sedangkan ulama usia di atas 45 tahun mempunyai rerata sebesar 65,59. Penilaian terhadap dimensi toleransi menunjukkan nilai $t=2,887$ ($p<0,05$) dengan nilai rerata ulama usia kurang dari 45 tahun sebesar 38,89 sedangkan ulama usia di atas 45 tahun mempunyai rerata sebesar 37,22. Penilaian terhadap dimensi pro-kewargaan menunjukkan nilai $t=2,301$ ($p<0,05$) dengan nilai rerata ulama usia kurang dari 45 tahun sebesar 106,66 sedangkan ulama usia di atas 45 tahun mempunyai rerata sebesar 102,94. Hal ini menunjukkan bahwa ulama dengan usia kurang dari 45 tahun menunjukkan sikap penilaian penerimaan yang lebih tinggi di semua dimensi konsep negara-bangsa yang lebih tinggi dibandingkan ulama dengan usia di atas 45 tahun.

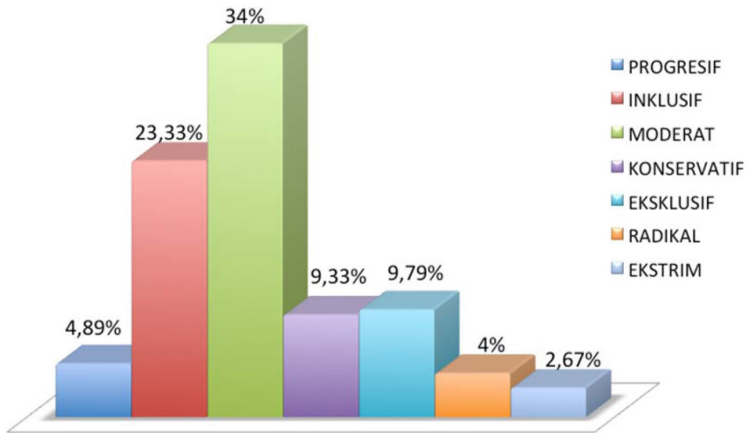
Penilaian konsep negara-bangsa pada ulama juga ditemukan adanya perbedaan dari sisi tingkat pendidikan. Dalam penelitian ini pendidikan dibedakan mulai dari pendidikan terakhir SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, S1, S2, dan S3. Berdasarkan analisis *one-way anova* diketahui bahwa penilaian terhadap dimensi anti-kekerasan menunjukkan nilai $F=2,470$ ($p<0,05$) artinya bahwa ada perbedaan penilaian dimensi anti-kekerasan berdasarkan tingkat pendidikan, dan perbedaan itu muncul pada jenjang pendidikan S1 dan S2, S2 mempunyai penilaian dimensi anti-kekerasan lebih tinggi dibandingkan S1, sedangkan untuk jenjang pendidikan yang lain tidak ditemukan perbedaan. Penilaian terhadap dimensi pro-sistem menunjukkan nilai $F=3,665$ ($p<0,05$) artinya bahwa ada perbedaan penilaian dimensi pro-sistem berdasarkan tingkat pendidikan, dan perbedaan itu muncul hanya pada jenjang

pendidikan S1, S2, dan S3. S3 mempunyai penilaian dimensi pro-sistem paling tinggi dibandingkan S2 dan S1, dan jenjang pendidikan S2 lebih tinggi dibandingkan S1, sedangkan untuk jenjang pendidikan yang lain tidak ditemukan perbedaan.

Penilaian terhadap dimensi toleransi, diketahui nilai $F=3,067$ ($p<0,05$) yang menunjukkan ada perbedaan penilaian dimensi toleransi hanya pada jenjang pendidikan S1, S2, dan S3. Pendidikan akhir pada jenjang S2 mempunyai penilaian yang lebih tinggi pada dimensi toleransi dibandingkan dengan ulama dengan pendidikan akhir S1, dan ulama dengan jenjang pendidikan S3 juga mempunyai penilaian yang lebih tinggi pada dimensi toleransi dibandingkan dengan ulama dengan pendidikan akhir S1. Demikian juga pada dimensi pro-kewargaan, ditemukan nilai $F=3,326$ ($p<0,05$) dengan muncul perbedaan penilaian dimensi pro-kewargaan pada ulama dengan jenjang pendidikan akhir, S1, S2, dan S3. Ulama dengan pendidikan akhir pada jenjang S2 mempunyai penilaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan ulama dengan pendidikan akhir S1, dan ulama dengan jenjang pendidikan S3 mempunyai penilaian yang lebih tinggi pada dimensi pro-kewargaan dibandingkan dengan ulama dengan pendidikan akhir S1. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat pendidikan ulama memengaruhi cara pandang mereka dalam menilai konsep negara-bangsa secara lebih terbuka.

c. Karakter

Dari aspek karakteristiknya, hasil survei ini memperlihatkan ulama atau tokoh Muslim di Indonesia yang terbesar berkarakter moderat (34 persen) dan inklusif (23,33 persen). Sementara mereka yang berkarakter konservatif 9,33 persen dan eksklusif 9,79 persen. Sisanya, kelompok ulama yang berkarakter progresif berjumlah 4,89 persen; mereka yang radikal berjumlah 4 persen, dan yang ekstrem hanya 2,67 persen.

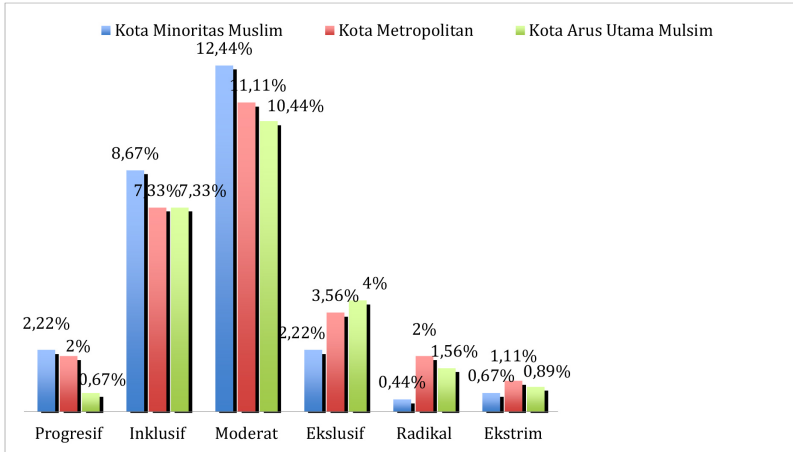


Grafik 9: Karakteristik ulama

Apa artinya angka-angka karakter tersebut? Angka-angka karakter itu menjelaskan ulama yang berada pada posisi tengah (inklusif-moderat-konservatif-eksklusif) berjumlah besar dan yang berada pada posisi progresif maupun radikal-ekstrem sama-sama berjumlah kecil. Tampaknya ini menjelaskan bahwa sebagian besar ulama bersikap positif terhadap konsep negara-bangsa dan turunannya.

Jika kita lihat dari aspek klaster kota, data yang ada menunjukkan bahwa ulama di daerah atau kota dengan minoritas Muslim memiliki karakter progresif, inklusif dan moderat yang lebih tinggi (secara berurutan: 2,22 persen, 8,67 persen, dan 12,44 persen) dibandingkan ulama di kota metropolitan (2 persen, 7,33 persen, dan 11,11 persen) dan kota arus utama Muslim (0,67 persen, inklusif 7,33 persen, moderat 10,44 persen). Dari arah karakter sebaliknya (eksklusif, radikal dan ekstrem) ulama di kota dengan minoritas Muslim tercatat lebih rendah (secara berurutan: 2,22 persen, 0,44 persen, dan 0,67 persen) daripada ulama di kota metropolitan Islam (3,56 persen, 2 persen, dan 1,11 persen) dan kota arus utama Muslim (4 persen, 1,56 persen, dan 0,89 persen). Tren ini juga mengonfirmasi temuan tentang penerimaan terhadap

konsep negara-bangsa di mana ulama yang berada di kota dengan minoritas Muslim memiliki penerimaan yang lebih tinggi sebagaimana digambarkan dalam Grafik 3 pada sub-bab sebelumnya di atas.



Gambar 10: Dimensi karakteristik ulama berdasarkan klaster kota

Analisis kuantitatif menunjukkan temuan perbandingan karakter ulama antar kota yang menarik. Ulama yang tergolong *progresif* paling banyak ditemukan di kota Jakarta (13,80 persen), Manado (13,80 persen), dan Ambon (13,80 persen). Kemudian disusul kota Surabaya sebanyak 9,70 persen dan selanjutnya ulama di kota Medan (6,70 persen) dan Makassar (6,70 persen). Ulama yang tergolong *inklusif* juga terbanyak terdapat di Jakarta (41,40 persen), selanjutnya di Pontianak (36,70 persen), Surabaya (35,50 persen), dan di Makassar (33,30 persen). Ulama yang termasuk dalam kategori *moderat* secara berurutan dari yang tertinggi ditemukan pada ulama di Kupang (53,30 persen), selanjutnya di Surakarta (50 persen), dan Palangka Raya (46,70 persen). Ulama yang tergolong *konservatif* banyak ditemukan di Aceh sebesar 23,30 persen, di Pontianak sebesar 16,70 persen dan di Banjarmasin sebesar 13,30 persen.

Sedangkan ulama yang masuk dalam kategori *eksklusif* paling banyak ditemukan di Padang (20 persen), disusul Bandung (16,70 persen), Jakarta (13,80 persen), Aceh (13,30 persen), dan Banjarmasin (13,30 persen). Terdapat 13,30 persen ulama di Surakarta termasuk dalam kategori *radikal*, selanjutnya ada 10 persen ulama di Aceh dan 10 persen ulama di Banjarmasin yang juga termasuk dalam kategori ulama radikal. Ulama yang termasuk dalam kategori *ekstrem*, paling tinggi terdapat di kota Surakarta sebanyak 13,30 persen dan di Banjarmasin sebanyak 6,70 persen.

KESIMPULAN

Posisi ulama, baik dalam kehidupan kemasyarakatan maupun politik kian dirasakan. Di sisi lain secara politik diskursus relasi agama dan negara selalu menemukan titik *recurrent*-nya di dunia Muslim, tidak terkecuali dalam konteks politik di Indonesia. Riset dan kajian tentang ulama dalam kaitannya dengan negara-bangsa telah banyak dilakukan, namun masih sangat jarang yang memotret secara komprehensif dengan pendekatan kuantitatif melalui survei. Riset yang dituangkan dalam artikel ini mengisi kekosongan itu. Hasilnya, sebagian mengafirmasi dan memastikan temuan-temuan penelitian lain seperti tentang arus utama moderasi di kalangan mayoritas ulama, tetapi sebagian lain menyuguhkan hal-hal baru yang sangat dinamis.

Metode dan cara penyuguhan survei ini berusaha menghindari pertaruhan cara berpikir parsial seperti memaparkan berapa persen ulama yang setuju penegakan syariat Islam, setuju dengan menggunakan kekerasan dalam kerangka *jibād fi sabilillāh*, menolak rumah ibadah agama lain, dan seterusnya. Meskipun aitem dalam kuesioner banyak sekali pernyataan tentang hal itu. Yang ingin disampaikan oleh hasil survei ini lebih tentang pola penerimaan dan penolakan, dimensi dan karakter keulamakan berbasis konsep yang argumennya dijelaskan di muka.

Banyak hal telah disampaikan secara detail di atas, bagian kesimpulan dan diskusi ini hanya memungut sedikit darinya, termasuk yang belum dipaparkan secara eksplisit. *Pertama*, meskipun peran organisasi keagamaan besar seperti NU dan Muhammadiyah sangat signifikan di Indonesia, dari 450 ulama yang disurvei terdapat 41,09 persen yang menyatakan berada di luar dua organisasi besar itu dan di luar dua minoritas di dalam Islam (Syiah dan Ahmadiyah). Banyak darinya juga tidak memiliki kedekatan dengan lembaga keagamaan yang formal atau konvensional, atau memiliki pola hubungan yang sangat cair dengan organisasi keagamaan. Sampai di sini, bila transformasi moderasi Islam dibutuhkan, sebaiknya tidak hanya menysar ulama-ulama yang merepresentasikan organisasi keagamaan.

Kedua, jika transformasi melalui organisasi keagamaan ulama dilakukan, khususnya di kalangan NU dan Muhammadiyah, tampaknya Muhammadiyah perlu mendapatkan perhatian lebih. Sebagaimana temuan survei ini, penerimaan ulama NU terhadap konsep negara-bangsa sebesar 83 persen (hanya ada penolakan 5 persen) lebih tinggi dibandingkan ulama dari kalangan Muhammadiyah yang berjumlah 63,4 persen (penolakan masih besar 21,1 persen).

Ketiga, temuan survei berdasarkan daerah atau kota sangat dinamis. Untuk memahaminya secara lebih mendalam tentu tidak bisa mengandalkan hasil survei atau tulisan di bab ini saja. Tidak mengejutkan membaca temuan survei ini bahwa para ulama di Surakarta tergolong yang tertinggi (30 persen; bersama Banjarmasin) dalam menunjukkan sikap penolakan mereka terhadap negara-bangsa. Namun bila hasil survei ini dibaca secara jeli, pada saat bersamaan kita mendapatkan adanya 50 persen ulama yang menjadi responden survei ini di Surakarta yang tergolong berkarakter moderat (dalam survei ini merupakan kategori ketiga teratas setelah progresif dan inklusif). Sampai di sini, untuk sebagian kasus dan temuan, cara baca antar bagian terhadap survei dalam bab ini saja

akan memberikan pengetahuan dan pelajaran yang menarik. Meskipun untuk memahami mengapa ulama Banjarmasin tergolong yang tertinggi dalam menolak negara-bangsa tidaklah mudah. Salah satu jawabannya barangkali karena unsur-unsur lokalitas yang membuat mereka merasa jauh dan dianaktirikan oleh pusat. Hal sama berlaku di Denpasar, di mana para ulama menunjukkan dukungan terhadap sikap anti-kekerasan yang paling rendah (16,70 persen); hal yang tidak bisa dipisahkan dari kontestasi politik di tingkat lokal, yang dipicu oleh politik *ajeg* Bali yang dikembangkan kelompok dominan.

Keempat, last but not least temuan penting yang mungkin membuat kita cukup optimis adalah ulama yang berkarakter inklusif dan moderat (jika digabung) berjumlah total 57,33 persen yang merupakan mayoritas di kalangan ulama Indonesia yang disurvei. Tentu sulit mengharapakan figur ulama berkarakter progresif yang sangat dominan, sehingga jumlah mereka sebesar 4,89 persen merupakan perkembangan yang cukup baik. Upaya mentransformasikan sejumlah 19,12 persen ulama yang berkarakter konservatif-eksklusif menjadi ulama yang inklusif-moderat merupakan agenda yang penting. Apalagi, melibatkan 4 persen yang radikal dan 2,67 persen yang ekstrem merupakan pekerjaan rumah di kalangan internal ulama maupun pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Wahiduddin. 2012. *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Aiken, L. R. 1985. Three Coefficients For Analyzing the Reliability and Validity of Ratings. *Educational and Psychological Measurement* 45(1): 131-142.
- American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. 1999. *Standards for Educational And Psychological Testing*. Washington, DC: Author.
- Azra, Azyumardi. 2004. *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern Ulama' in the Seventeenth And Eighteenth Centuries*. Honolulu: Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin and University of Hawai'i Press Honolulu.
- Azwar, S. 2012. *Penyusunan Skala Psikologi*. Edisi ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2012. *Reliabilitas dan Validitas*. Edisi ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berhend, Timothy Earl. 2003. "Reading the Myth: Public Teaching of Abu Bakar Baasyir." *MediaTor* 4 (2).
- Bruinessen, Martin van. 1990. "Indonesia's Ulama and Politics: Caught between Legitimising the Status Quo and Searching for Alternatives." *Prisma: The Indonesian Indicator* 49: 52–69.
- Campbell, David F. J. 2008. *The Basic Concept for the Democracy Ranking of the Quality of Democracy*. Vienna: Democracy Ranking.
- Galtung, J. 1996. *Peace By Peaceful Means Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: Sage Publications.

- Hasyim, Syafiq. 2015. "Majelis Ulama Indonesia and Pluralism in Indonesia." *Philosophy and Social Criticism* 1 (9).
- . 2014. "Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and its Role in the Shariatization in Indonesia". *Disertasi*. Berlin: Free University Berlin.
- Hisyam, Muhammad. 2001. *Caught between Three Fires: The Javanese Panguku Under the Dutch Colonial Administration, 1882-1942*. Leiden, Jakarta: INIS.
- Hoesterey, James Bourk. 2015. *Rebranding Islam: Piety, Prosperity and A Self-Help Guru*. Stanford: Stanford University Press.
- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kiyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim & Muntaha Azhari. Jakarta: P3M.
- Hoben, M., Bar, M., Mahler, C., Berger, S., Squires, J.E., Estabrooks, C.A., Kruse, A., & Behrens, J. 2014. "Lingustic Validation of the Alberta Context Tool and Two Measures of Research Use, for Jerman Residential Long Term Care." *BMC Reasearch Note* 7 (67): 1-12.
- Hosen, Nadirsyah. 2003. "Fatwa and Politics in Indonesia." dalam *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, diedit oleh Arskal Salim and Azyumardi Azra. Singapore: ISEAS.
- . 2004. "Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975–1998)." *Journal of Islamic Studies* 15 (2): 147–79.
- Ichwan, Moch Nur. 2005. "Ulama, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto." *Islamic Law and Society* 12 (1): 45–72.
- . 2013. "Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy." dalam *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the 'Conservative Turn'*, diedit oleh Martin van Bruinessen, 60-104. Singapore: ISEAS.

- . 2012. “Local Politics of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten.” *Journal of Indonesian Islam* 6 (1): 166-94.
- . 2016. “MUI, Aksi Bela Islam, dan Umat Mengambang,” *Maarif*, 11/2:87-104.
- Kersten, Carool. 2015. *Islam in Indonesia, The Contest for Society, Ideas and Values*. London: Hurst.
- Kline, R. B. 2005. *Principle and Practice of Structural Equation Modeling*. New York: The Guilford Press.
- Landau, S. & Everitt, B.S. 2004. *A Handbook of Statistical Analysis Using SPSS*. New York: Chapman & Hall/CRS Press LCC.
- Lister, M. and Emily Pia, 2008. *Citizenship in Contemporary Europe*. Edinburg: Edinburg University Press.
- Mansurnoor, Iik Arifin. 1990. *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Menchik, Jeremy. 2007. “Illiberal but Not Intolerant: Understanding the Indonesian Council of the Ulamas.” *Inside Indonesia*. October-December.
- Marnat, G. G. 2003. *Handbook of Psychological Assessment*. Edisi ke-4. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Mudzhar, M. Atho'. 1990. “Fatwas of the Indonesian Council of Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975–1988.” *Disertasi*. Los Angeles: University of California.
- . 2001. “The Ulama, the Government, and Society in Modern Indonesia: The Indonesian Council of ‘Ulama’ Revisited.” dalam *Islam in the Era of Globalization*, diedit oleh Johan Meuleman. Jakarta: INIS.
- Netemeyer, R.C., Bearden W. O., & Sharma. S. 2003. *Schalling Procedures: Issues and Applications*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

- Pribadi, Yanwar. 2013. "Islam and Politics in Madura: Ulama and Other Local Leaders in Search of Influence (1990-2010)." *Disertasi*. Leiden: Leiden University.
- Saat, Norshahril. 2016. "Theologians 'Moralizing' Indonesia? The Case of the Post-New Order Ulama Council of Indonesia." *Asian Journal of Social Science* 44 (4-5): 546-570.
- Satha-Anand, C. 2016. *Barangsiapa Memelibara Kehidupan*. Bandung: Mizan.
- Sirry, Mun'im. 2013. "Fatwas and Their Controversy: The Case of the Council of Indonesian Ulama." *Journal of Southeast Asian Studies* 44 (1): 100-117.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. 2016. *Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Emir Cakrawala Islam.
- Urbina, S. 2004. *Essentials of Psychological Testing*. New Jersey: John Willey & Sons.
- Van Dijk, C. 1996. "Ulama and Politics". *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde* 152 (1): 109-43.
- Woolf, Linda M. and Michael R. Hulsizer 2003. "Intra- and Inter-Religious Hate and Violence: A Psychosocial Model." *Journal Of Hate Studies* 2 (1): 1-47.

Lampiran 1: Blueprint skala karakteristik ulama sebagai acuan penyusunan aitem

No	Dimensi	Indikator Perilaku	Jumlah Aitem		Jumlah & Bobot Per Dimensi
			F	UF	
1.	Anti-kekerasan	Menolak segala bentuk kekerasan, termasuk dengan alasan <i>jihad</i> dan <i>amar ma'ruf nabi munkar</i> .	2	2	12 (15%)
		Mengecam penggunaan ujaran kebencian terhadap minoritas agama dan kepercayaan lain.	2	2	
		Menolak dan tidak menyetujui tindakan persekusi dan penyerangan terhadap kelompok non Muslim dan minoritas dalam Islam	2	2	
2.	Pro-sistem	Menerima Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologi negara.	2	2	20 (25%)
		Menerima NKRI sebagai bentuk negara.	2	2	
		Menerima UUD 1945 sebagai konstitusi negara	2	2	
		Menerima keabsahan pemerintah yang terpilih.	2	2	
		Menerima regulasi yang disusun pemerintah terpilih.	2	2	
3.	Toleransi	Menerima keberadaan individu/kelompok lain yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan (non Muslim)	2	2	12 (15%)
		Menerima keberadaan kelompok minoritas dalam Islam.	2	2	
		Mendorong keterlibatan individu/kelompok agama dan keyakinan yang berbeda dalam kegiatan sosial.	2	2	

❁ ULAMA DAN NEGARA-BANGSA

4.	Pro-kewargaan	Menerima prinsip dasar persamaan hak dan kewajiban dalam politik.	2	2	36
		Menerima prinsip kesetaraan dalam akses anggaran negara	2	2	(45%)
		Menerima keselarasan konsep demokrasi dan nilai-nilai Islam.	2	2	
		Menerima kebebasan berkumpul/ berserikat dan berpendapat.	2	2	
		Menerima demokrasi substantif (persamaan antar kelas, antar agama, gender, dll.)	2	2	
		.Menerima konsep dasar HAM	2	2	
		.Menerima hak beragama	2	2	
		.Menerima hak bersyarikat	2	2	
		Menerima perlakuan non-diskriminasi.	2	2	
Total Aitem			40	40	80

Lampiran 2: Penyusunan format final alat ukur

No	Dimensi	Indikator Perilaku	Jumlah Aitem		Jumlah & Bobot Per Dimensi
			F	UF	
1.	Anti-kekerasan	Menolak segala bentuk kekerasan, termasuk dengan alasan <i>jihad</i> dan <i>amar ma'ruf nabi munkar</i> .	1	1	9 (13%)
		Mengecam penggunaan ujaran kebencian terhadap minoritas agama dan kepercayaan lain.	2	2	
		Menolak dan tidak menyetujui tindakan persekusi dan penyerangan terhadap kelompok non Muslim dan minoritas dalam Islam	1	2	
2.	Pro-sistem	Menerima Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologi negara.	2	2	18 (25%)
		Menerima NKRI sebagai bentuk negara.	1	1	
		Menerima UUD 1945 sebagai konstitusi negara	2	2	
		Menerima keabsahan pemerintah yang terpilih.	2	2	
		Menerima regulasi yang disusun pemerintah terpilih.	2	2	
3.	Toleransi	Menerima keberadaan individu/kelompok lain yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan (non Muslim)	2	2	11 (16%)
		Menerima keberadaan kelompok minoritas dalam Islam.	1	2	
		Mendorong keterlibatan individu/kelompok agama dan keyakinan yang berbeda dalam kegiatan sosial.	2	2	

❁ ULAMA DAN NEGARA-BANGSA

4. Pro-kewargaan	Menerima prinsip dasar persamaan hak dan kewajiban dalam politik.	1	2	32 (46%)
	Menerima prinsip kesetaraan dalam akses anggaran negara	2	2	
	Menerima keselarasan konsep demokrasi dan nilai-nilai Islam.	1	2	
	Menerima kebebasan berkumpul/ berserikat dan berpendapat.	2	2	
	Menerima demokrasi substantif (persamaan antar kelas, antar agama, gender, dll.)	2	2	
	Menerima konsep dasar HAM	2	2	
	Menerima hak beragama.	1	2	
	Menerima hak berserikat.	2	2	
	Menerima perlakuan non-diskriminasi.	1	2	

Total Aitem	32	38	70
--------------------	-----------	-----------	-----------

ULAMA DAN NEGARA-BANGSA

Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia

Karya ini bukan saja berharga untuk memahami bagaimana posisi ulama Indonesia masa kini berhadapan dengan negara-bangsa, tetapi juga membaca arah dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam konteks menguatnya pengaruh Islam politik. Ulama merupakan salah satu aktor penting yang mewarnai dinamika sosial, politik, dan kebangsaan Indonesia dari masa ke masa. Politik kekinian Indonesia membuktikan kembali hal ini.

Buku ini merupakan kelanjutan dari buku pertama yang telah terbit sebelumnya, *Ulama, Politik dan Narasi Kebangsaan: Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-kota di Indonesia*. Jika buku pertama menyajikan temuan penelitian di lima belas kota di Indonesia dengan menekankan dinamika lokal yang mewarnai hubungan ulama dan negara-bangsa di masing-masing kota, buku yang ada di hadapan Anda ini menyajikan sepuluh bab analisis tematik hasil penelitian tersebut, plus dialog teoretis dan refleksi atas temuan-temuan fakta lapangan.



ISBN 978-623-90252-1-2



9 786239 025212